PERAN PEKERJA SOSIAL SEKOLAH DALAM MENANGANI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH-SEKOLAH DI BANDUNG

ROLE OF SCHOOL SOCIAL WORKER IN DEALING WITH BULLYING IN SCHOOL IN BANDUNG

Sakroni

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Jl. Ir. H.Djuanda no. 367 Bandung, Indonesia, 40135
Email: sakroniateng@yahoo.co.id

Diterima: 16 Agustus 2019; Direvisi: 14 Nopember 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan pada siswa sekolah sangat mengkhawatirkan orang tua dan para pendidik. Sekolah dituntut untuk membentuk karakter positif serta mencegah terjadinya perundungan. Indonesia sejak lama sudah memperhatikan kesejahteraan anak-anak di sekolah, termasuk memperhatikan siswa yang tidak mampu memperbaiki tingkatan kelas mereka. Secara bertahap, perhatian ini harus ditingkatkan karena kurikulum menjadi lebih sering berubah. Selain itu, pekerja sosial sekolah harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti ruang lingkup misi sekolah yang menjadi lebih luas dan lebih inklusif untuk memastikan rasa hormat siswa. Karena sekolah harus mengutamakan perlindungan terhadap siswa, masalah perundungan di lingkungan sekolah harus menjadi perhatian utama bagi administrator sekolah dan regulator pendidikan. Penelitian kualitatif ini telah mengumpulkan data melalui sumber deskriptif dan metode studi kasus di Sekolah Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memperluas pengetahuan tentang peran pekerja sosial di lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan dan mendidik para korban, pelaku, serta orang tua siswa. Studi ini menggali kontribusi yang diberikan oleh pekerja sosial sekolah dalam membantu sekolah untuk mencegah intimidasi dan perundungan di lingkungan sekolah di Bandung. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah peran pekerja sosial di lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa sekolah yang berpartisipasi dalam penelitian ini sangat membutuhkan pekerja sosial yang dapat mengisi posisi kosong dalam proses pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk mencegah peristiwa perundungan.

Kata kunci: *pekerja sosial sekolah, perundungan, intimidasi, konseling.*

Abstract

The rise of violence cases on students is very worrying for parents and educators. School has been challenged to shape the character of a positive person and prevent bullying event. Indonesia have long been concerned about the children prosperity in school. They also pay attention to students who are not able to improve the class degree. Gradually these concerns become more important as curriculum are changing more frequently. In addition, school social worker must consider other factors such as the school has expanded the mission scope and become more inclusive to ensure student respects. As school must consider the student protection as more important, then, the bullying issues in school environment become main attention by school administrator and education regulator. This study is qualitative that collecting the data through descriptive source and study cases method in schools Bandung. The purpose of this research is to expand the knowledge about the role of social workers in schools environment to prevent bullying and educate victims and perpetrators as well as student parents. This study explore the contribution given by school social worker to help school to prevent intimidation and bullying in school environment in Bandung. The main research question is the role of social worker in the school environment to prevent bullying prevention in school environment. Our analysis result concluded that the social worker is an urgent need for

the school participating in this study. The social workers can fill the void position in the educational process which they must stay as school social workers to deal with the bullying event prevention.

Keywords: school social workers, bullying, intimidation, counseling.

PENDAHULUAN

Munculnya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian bagi guru dan orang tua (Akos & Galassi, 2004). Sekolah sebagai tempat bagi anak-anak untuk mendapatkan layanan pengetahuan dan pendidikan telah menghadapi tantangan untuk mengevaluasi layanan dan bantuan mereka dalam mencegah perilaku kekerasan di kalangan siswa mereka, terutama perundungan di lingkungan sekolah (Espelage & Swearer, 2003).

Pada dasarnya, perundungan terjadi karena siswa melanggar peraturan sekolah, mulai dari bersikap tidak etis (misalnya, merokok di area sekolah, minum alkohol, sering tidak hadir) hingga perilaku menyimpang (misalnya mencuri, berkelahi, dan mengintimidasi junior) (Hinduja & Patchin, 2014). Pada penyimpangan yang lebih serius, mereka bahkan terlibat dengan kegiatan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, geng, dan kepemilikan senjata

Tabel 1. Perilaku menyimpang siswa di wilayah sekolah pada tahun 2014

No	Kelompok/ wilayah	Tahun				Total
		2011	2012	2013	2014	
Pendidikan						
A	Perkelahian pelajar	20	71	52	103	246
B	Intimidasi siswa	69	53	41	46	209
C	Perusakan sarana sekolah	50	66	60	67	243
D	Perundungan	61	130	91	149	431
E	Sering tidak hadir	5	8	14	10	37
F	Dikeluarkan	11	21	15	12	59
G	Kegagalan dalam ujian	58	103	5	15	181

H	diskriminasi kebijakan (pemerasan di sekolah, penyegehan sekolah, pembatasan ujian, dll.)	60	63	56	36	215
I	media pembelajaran/ buku teks yang tidak mendidik	4	7	37	23	71
TOTAL		338	522	371	461	1692

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014

Tabel 1 menunjukkan berbagai masalah dan kekhawatiran yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan perilaku menyimpang siswa yang mencirikan dampak dari perundungan. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan mendasar yang perlu dipertimbangkan. Pertama, sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk menanamkan visi layanan pendidikan dan perlindungan kepada siswa di lingkungan sekolah, termasuk upaya mereka dalam menerapkan konsep anti-kekerasan terhadap anak-anak? Kedua, faktor apa saja yang harus mendapatkan perhatian penuh oleh administrator sekolah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak berdasarkan visi layanan kerja sosial?

Perilaku perundungan di sekolah telah dipelajari di berbagai daerah (Nocentini dkk., 2013; Fekkes dkk., 2016; dan Farmer dkk., 2015), tetapi skala akibat dan intervensi sosial yang tepat masih jarang dilaporkan. Karena perundungan berdampak besar kepada siswa (Kaufman, 2013), menyatakan perlunya intervensi yang tepat. Di samping itu, hanya sebagian kecil guru (27,5 persen) yang

berpikir bahwa intimidasi adalah perilaku normal, sementara mayoritas guru (73 persen) menganggap bahwa ia merupakan perilaku yang berbahaya bagi anggota sekolah dan masyarakat. Masalahnya akan memburuk ketika siswa berada dalam tekanan, dan menularkan perilaku tersebut kepada siswa lain (Shearer, et al., 2016). Menurut Paludi, M. A. (2015) intimidasi paling sering terjadi pada masa sekolah menengah (misalnya, tingkat SMP dan SMA) karena egosentrisme remaja berkembang pada usia ini.

Ada beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab intimidasi di sekolah, utamanya disebabkan oleh pengaruh teman sebaya dan iklim sekolah. Pengaruh teman sebaya telah dilaporkan sebagai faktor utama terjadinya perundungan di sekolah (Espelage, et al., 2015). Selain itu (Dembo, dkk, 2016), melaporkan bahwa pengaruh “jadilah teman” adalah faktor kedua yang paling negatif yang mendorong kekerasan, perilaku bolos, serta kurangnya rasa hormat kepada guru dan orang tua. Ini didukung oleh Espelage, (2014) bahwa siswa khususnya di daerah perkotaan telah mengembangkan perilaku perundungan di sekolah karena dorongan dari teman sebaya. Pengaruh teman sebaya dan iklim sekolah memerlukan intervensi, terutama dengan dukungan eksternal sebagai alternatif untuk mengurangi penyebab terjadinya perilaku perundungan di sekolah, baik secara fisik maupun mental. Pekerja sosial telah menjadi tren utama dalam penelitian layanan sosial (Payne, 2015). Ketika komunitas tumbuh dan menuntut layanan yang lebih baik, maka pekerja sosial harus memperluas peran dan layanan mereka.

Pekerja sosial juga dituntut harus ada di sekolah untuk meningkatkan layanan pendidikan sosial, terutama dalam hal iklim sekolah dan hubungan antarsiswa. Selain itu, pekerja sosial dapat berkontribusi pada

lingkungan pendidikan dengan mempraktikkan pengetahuan dan kehidupan sosial mereka untuk membantu sekolah dalam intervensi pencegahan terjadinya perundungan (Hepworth dkk., 2016; Larkin, dkk, 2014) telah membahas bagaimana pekerja sosial dapat menjadi bagian integral dalam lingkungan sekolah melalui berbagai peran seperti menjadi anggota kelompok tugas atau komite sekolah, membantu dalam penelitian sekolah sosial, dan mengevaluasi program perencanaan jangka panjang milik sekolah. Sekolah juga dapat mempekerjakan pekerja sosial untuk mengevaluasi faktor risiko keselamatan siswa dan potensi masalah. Selain itu, pekerja sosial sekolah dapat bekerjasama dengan orang tua untuk mencegah perundungan, memberikan intervensi yang sesuai untuk korban, dan memberi layanan dan sumber daya yang memadai.

Studi yang menjelaskan kontribusi pekerja sosial sekolah masih sangat kurang, terutama dalam konteks sosial Indonesia dan lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, penelitian ini akan memperbaiki kesenjangan dalam hal literatur. Pada topik-topik penelitian perundungan, pekerja sosial sekolah dapat memiliki peran dan partisipasi yang signifikan jika mereka dapat mengatur kebijakan dan prosedur di sekolah atau melakukan hal-hal untuk membantu para korban, dan mencegah mereka dari perundungan berikutnya (Hinduja, 2016).

Hinduja & Patchin (2014) mendefinisikan perundungan sebagai peristiwa yang mengerikan dan kejam yang dilakukan oleh seseorang kepada anak atau sekelompok anak. Perundungan dapat terjadi sekali atau berulang kali. Para korban perundungan akan merasa malu, terluka, atau terhina dan terancam. Terkadang, para korban tidak menyadarinya (Smith, 2014), mendefinisikan perundungan sebagai perilaku yang terjadi berulang kali untuk menyakiti orang lain. Perilaku ini dapat

dilakukan dengan menyerang, baik secara fisik maupun verbal, dan mengisolasi korban.

Beberapa ahli juga menambahkan informasi baru untuk mendefinisikan perilaku perundungan (e.g., Smith, 2014; Hinduja & Patchin, 2014; Litwiler, & Brausch, 2013).

- a. Perilaku perundungan melibatkan kekuatan yang tidak seimbang. Anak-anak yang menjadi pelaku dapat melakukan intimidasi karena mereka memiliki kekuatan lebih dari korban, seperti usia yang lebih tua, badan yang lebih tinggi, dukungan teman sebaya yang lebih luas, dan status yang lebih tinggi.
- b. Perilaku perundungan sering kali merupakan kegiatan yang diulang-ulang untuk mendesak korbannya ke kondisi kronis.
- c. Perilaku perundungan dilakukan dengan tujuan untuk melukai korban, baik secara mental maupun fisik.
- d. Perilaku perundungan memiliki serangkaian serangan fisik, penghinaan verbal, penyebaran fitnah, gosip, hingga ancaman eliminasi dari teman sebaya.

Pekerjaan sosial adalah profesi yang berkaitan dengan membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif mereka (Lee & Hudson, 2017). Tujuannya adalah untuk membantu orang mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah menggunakan sumber daya mereka sendiri dan masyarakat. Pekerjaan sosial berkaitan dengan masalah individu dan pribadi, juga dengan masalah sosial yang lebih luas seperti kemiskinan, pengangguran dan kekerasan dalam rumah tangga (Payne, 2015).

Pekerjaan sosial merupakan bidang yang sangat luas dan beragam; ia menawarkan berbagai pilihan karier yang hampir tak terbatas.

Pekerja sosial bekerja di berbagai pengaturan, termasuk rumah sakit, organisasi nirlaba, pusat kesehatan mental, sekolah, lembaga advokasi, organisasi masyarakat, dan kantor pemerintah.

Sebuah studi oleh Gould & Taylor (2017) menunjukkan bahwa pekerja sosial harus beradaptasi dengan misi sekolah untuk menyediakan layanan sosial dengan kompetensi dan kepercayaan diri yang dimodifikasi. Karenanya, pekerja sosial sekolah membutuhkan tingkat kompetensi yang lebih tinggi untuk menangani tugas mereka dalam intervensi dan pencegahan perundungan. Ini masuk akal, karena untuk memenuhi peraturan akademik, mempertahankan dan meningkatkan fungsi mental, emosional, perilaku, kognitif dan pembelajar sosial siswa, pekerja sosial perlu meningkatkan kemampuan diri mereka (Hepworth dkk., 2016). Pekerja sosial sekolah juga dapat mempromosikan pengembangan lingkungan sekolah untuk mendukung hubungan yang positif, meningkatkan harga dan pemberdayaan diri.

Ada banyak dasar peraturan atau hukum yang menjadi tantangan utama bagi sekolah dalam upaya perlindungan terhadap siswa mereka. Sekolah pekerja sosial dapat berperan penting untuk membantu siswa mengurangi perilaku berisiko dan dampaknya, terutama dari perilaku intimidasi (Veenstra dkk., 2014). Pekerja sosial sekolah dapat menangani masalah serta memberikan informasi alternatif dan konsultasi tentang perilaku perundungan. Pekerja sosial sekolah yang peka terhadap hubungan antara siswa dan staf dapat menaikkan tingkat keselamatan siswa sembari menangani insiden dan memberikan intervensi yang memadai kepada korban.

Tugas ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 untuk memastikan perlindungan anak dari kekerasan.

Ini kemudian disempurnakan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak-anak juga memiliki martabat kemanusiaan di mana pun mereka berada. Ini berarti bahwa anak-anak di sekolah memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan sekolah. Selain itu, anak-anak harus dijamin perlindungan dan kebebasan mereka dari diskriminasi, terutama di masa sekolah.

Pasal 54 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak-anak di lingkungan sekolah harus dilindungi dari segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, administrator sekolah atau teman sebaya mereka.”

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 menyatakan bahwa guru dan tenaga kependidikan wajib menciptakan lingkungan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan berdialog. Ini berarti bahwa administrator sekolah harus mencegah penyebab terjadinya kekerasan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Padahal, jika kita perhatikan lebih dekat, perlindungan anak di sekolah terkadang menjadi tugas berat bagi seluruh anggota sekolah, yang membutuhkan intervensi terutama dari pekerja sosial sekolah untuk menjaga kesejahteraan siswa dalam interaksi di sekolah.

Pekerja sosial sekolah sangat penting bagi komunitas sekolah karena mereka dapat memberikan intervensi untuk menangani masalah kehidupan sosial, (misalnya, perselisihan keluarga, masalah kesehatan mental, kurangnya sumber daya dasar (makanan, pakaian, dan tempat tinggal), penyakit fisik, trauma, cacat perkembangan)

(Berg-Weger, 2016). Selain itu, mereka dapat meningkatkan kehidupan interaksi sosial seperti dalam hal masalah teman sebaya, kurangnya keterampilan sosial, atau berbagai bentuk pelecehan atau pengabaian. Sebagian besar masalah ini dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak dan interaksi mereka di lingkungan sekolah. Masalah tersebut dapat memiliki efek yang merugikan terhadap pembelajaran dan prestasi siswa (Clark, 2015).

Dari sudut pandang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada rumusan prinsip “ramah anak” yang harus diperhatikan oleh sekolah untuk menerapkan non-kekerasan, non-diskriminasi, memberikan yang terbaik dalam menjaga hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, dan prinsip menghargai pendapat mereka.

Ada banyak peran pekerja sosial seperti, mediator, *enabler*, dan pelatih nilai sosial (Werner, 2015). Dalam pengaturan sekolah, peran pekerja sosial dapat lebih spesifik seperti:

- a. Peran Petugas Pengawas Pelajar Bolos yang sering diberlakukan pada sistem sekolah besar, di mana kemungkinan kasus bolos akan lebih besar bila dibandingkan dengan sistem sekolah yang lebih kecil.
- b. Peran Advokat yang dapat memberikan perlindungan dan pertahanan terhadap hak-hak siswa yang melakukan pelanggaran agar dapat memperoleh kembali hak-hak mereka.
- c. Orangtua-guru sebagai penghubung sekolah-rumah.
- d. *Conferee* (konsultasi), yang berperan dalam melakukan pekerjaan sosial berupa pengadaan pertemuan untuk mendiskusikan kasus siswa (konferensi kasus). Pertemuan untuk membahas kasus-kasus yang melibatkan para profesional lain seperti guru, wali kelas, pejabat BP dan pemimpin sekolah, dapat juga melibatkan orang tua.

Pekerja sosial, bertindak sebagai *conferee*, harus dapat memimpin dan mengarahkan pertemuan.

- e. *Mediator* (penengah), di mana kadang-kadang pekerja sosial sekolah menghadapi situasi yang menuntut kenetralan atau ketidakberpihakan. Pekerja sosial diharuskan memediasi hubungan antara kedua pihak yang mengalami perpisahan, keretakan, atau kerusakan, karena perbedaan persepsi atau kepentingan.
- f. *Broker* (perantara), di mana pekerja sosial dapat menghubungkan sumber daya klien yang menyediakan layanan penting.
- g. Konselor (terapis), karena memang peran konselor di sekolah telah banyak dimainkan oleh profesi lain, sehingga pekerja sosial perlu mengetahui batas-batas peran konselor dan mengembangkan peran tertentu. Ada kecenderungan untuk melihat pekerja sosial lebih sebagai terapis konselor. Konselor melakukan konseling, sedangkan terapis melakukan psikoterapi.
- h. Anggota tim, pekerja sosial dan profesional lainnya (psikolog, terapis, guru pendidikan khusus, guru pendidikan jasmani, reguler) dapat membantu menentukan kebutuhan khusus dan kebutuhan khusus anak-anak (peserta didik) yang spesifik.
- i. Konsultan kesehatan mental, di mana pekerja sosial sekolah (dengan pengalaman pelatihan di bidang psikologi dan perilaku sosial individu) dapat bertindak sebagai konsultan untuk hubungan antarmanusia, sebagai bagian dari kurikulum serta aspek gaya mengajar.
- j. Spesialis perilaku, yaitu mereka yang memahami perilaku dan secara sistematis menerapkan prinsip-prinsip perilaku, terutama modifikasi perilaku. Di sekolah, pengetahuan tentang bagaimana mengubah perilaku dapat diterapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menyelesaikan masalah penelitian yang terjadi dalam konteks sekolah di Bandung. Data yang dianalisis diperoleh dari hasil penelitian. Data berupa wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, catatan, dan dokumentasi resmi lainnya. Peneliti telah melakukan eksplorasi melalui wawancara dengan guru BK (55 informan) dan (12 informan) personil staf sekolah di SMA umum dan swasta (SMA) di Bandung.

Pendekatan deskriptif kualitatif menjelaskan jenis penelitian kualitatif (Flick, 2014) di mana fakta tentang keadaan, fenomena, variabel dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian disediakan dalam mengungkap fakta. Informasi yang dikumpulkan disajikan dan diinterpretasikan dengan situasi saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: (1) Beberapa guru BK menyatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa ada siswa yang menunjukkan perilaku perundungan di sekolah, seperti saling mengejek dan menghina, atau beberapa siswa yang saling memukul. (2) Guru BK hanya melakukan upaya untuk meredakan siswa yang berperilaku perundungan jika ada siswa yang datang ke guru BK melaporkan perundungan yang terjadi. (3) Implementasi bimbingan dan konseling sekolah telah mengarah pada pola BK 17+, meskipun tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. (4) Ada beberapa siswa yang mengaku telah mengalami perundungan (dilecehkan, dikucilkan oleh teman-teman mereka) dan sampai hari ini mereka masih tertekan dan tidak memberi tahu orang lain (tentang masalah mereka sendiri). (5) Ada beberapa guru mata pelajaran yang menyatakan bahwa masih ada komunikasi yang tidak

optimal antara guru BK dengan personil sekolah lainnya, terutama kepada guru mata pelajaran, dalam hal menangani siswa yang menunjukkan perilaku perundungan.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Penelitian Tahun 2018

No	Aspek	Hasil Penelitian	
		YA(%)	TIDAK (%)
1	Pemahaman guru BK tentang konsep perilaku perundungan		
	a. Pemahaman tentang perundungan	67,65	32,35
	b. Bentuk perundungan	75,25	24,75
	c. Faktor penyebab perundungan	79,41	20,59
	d. Dampak perundungan	68,82	31,18
	Rata-rata	72,78	27,22
2	Kerjasama dengan personil lain di sekolah		
	a. Dengan kepala sekolah	75,29	24,71
	b. Dengan guru mata pelajaran	88,35	11,65
	Rata-rata	81,82	18,18
3	Implementasi layanan bimbingan dan konseling		
	a. Orientasi layanan	71,18	28,82
	b. Layanan informasi	88,24	11,76
	c. Layanan distribusi	70,59	29,41
	d. Layanan bimbingan kelompok	55,88	44,12
	Rata-rata	71,47	28,52
	Total rata-rata	75,36	24,64

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, secara umum, guru BK telah berupaya untuk mencegah perilaku perundungan dengan uraian sebagai berikut: pada aspek pemahaman guru BK tentang perilaku perundungan dari 55 informan (72,78%), guru BK telah memiliki pemahaman tentang konsep perilaku perundungan. Pemahaman yang paling dominan dari guru BK adalah pemahaman tentang penyebab perundungan. Kemudian pada aspek implementasi layanan bimbingan

dan konseling yang disediakan dari 55 informan (81,82%), guru BK telah memberikan layanan BK dalam upaya mencegah perilaku perundungan. Layanan BK yang paling dominan adalah layanan orientasi. Selanjutnya, pada aspek kerjasama dengan personil sekolah lainnya di sekolah dari 55 informan (71,47%), guru BK telah bekerja sama dengan personil lain di sekolah di mana yang paling dominan adalah kerjasama dengan kepala sekolah.

Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai lembaga publik untuk mendidik anak bangsa menjadi generasi emas masa depan. Namun sekolah juga dijadikan garda utama dalam rangka pembangunan sosial. Oleh karena itulah tidak boleh ada anak yang dikucilkan atau dikecualikan di dalamnya. Mereka harus mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi dalam karir dengan standar sains dan kurikulum. Namun, sekolah kekurangan staf psikologi dan sosiologi untuk menangani kehidupan sosial siswa yang berdampak pada efek samping dari viktimisasi teman sebaya. Dalam hal ini, pekerja sosial dapat menjadi alternatif untuk memberikan layanan profesional yang berguna untuk membantu siswa yang terpinggirkan, baik untuk kelompok atau pribadi, dan berpartisipasi dalam pendidikan (Hepworth dkk., 2016). Pekerja sosial dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam proses pendidikan. Untuk melakukan ini, mereka harus membangun kemitraan dengan guru, orang tua, dan siswa untuk menangani situasi yang kompleks, terutama untuk sekolah yang dihadapkan dengan peristiwa perundungan yang sering terjadi. Karena pendidikan tidak hanya memberikan kegiatan belajar tetapi juga untuk menyediakan interaksi sosial yang sehat, maka, pekerja sosial sekolah memiliki peran yang lebih penting untuk membantu siswa mengatasi interaksi antarteman sebaya (Hepworth dkk., 2016). Hal ini didukung oleh

pernyataan dari seorang guru BK (Ap) yang menyatakan bahwa:

“Saat ini, pekerja sosial sekolah telah dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak untuk sekolah kita. Mereka dapat mengisi bagian yang paling rentan dari proses pendidikan, dan peran mereka menjadi rumit ketika siswa (KI) memasuki tingkat pertama”2018.

Selain itu, guru lain juga menganggap bahwa pekerja sosial sekolah dapat terbentuk melalui kerja tim interaktif untuk membantu guru. Mereka menyatakan:

“ketika pekerja sosial sekolah berpartisipasi dalam kegiatan sekolah kami, mereka adalah teman kami, dan mereka dapat bekerja dengan guru, keluarga, dan anak-anak untuk mengatasi perilaku berisiko seperti perundungan atau situasi berisiko yang dapat membahayakan hak individu. Mereka menjadi bagian dari upaya bersama untuk membuat sekolah lebih aman. Dalam menjaga martabat dan rasa hormat dari orang-orang, sekolah harus menjadi sebuah komunitas dan memiliki rasa hormat.”

Pekerja sosial sekolah dapat membantu dalam mencegah perundungan di sekolah karena mereka dapat membantu dalam mengimplementasikan anti-perundungan, membantu para korban, intimidasi, dan individu yang hadir dalam insiden intimidasi. Hal ini dilakukan dengan menyediakan layanan konseling dan mengajarkan kepada siswa beberapa keterampilan yang berkaitan dengan konteks interaksi sosial. Hal ini diakui oleh (Hk) sebagai administrator sekolah yang menjelaskan bahwa

“Ada alasan konkret bahwa perundungan di sekolah dapat ditangani di sekolah kami, karena kami memiliki intervensi untuk mengurangi perilaku perundungan dengan melibatkan pekerja sosial kami untuk turut

serta dan membangun kesehatan sosial dan emosional yang sehat dari para siswa dan membantu mereka belajar tentang interaksi teman sebaya yang sehat.”

Hal ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya seperti Evans dkk., (2014), bahwa iklim sekolah dan intervensi pekerja sosial memiliki kaitan langsung dengan pencegahan perundungan. Ada banyak aspek lingkungan sekolah yang harus dipertimbangkan, seperti budaya sekolah tentang interaksi staf-siswa, keterlibatan orang tua, dan persepsi siswa.

Demikian pula, seorang pekerja sosial yang peneliti wawancarai di waktu kelas berkata bahwa mereka diterima di lingkungan sekolah karena mereka telah mempersiapkan dan menganggap bahwa penampilan publik pekerja sosial sekolah itu penting. Mereka harus menjaga citra positif dan interaksi dengan anggota sekolah. Mereka dapat mengundang dan membangun interaksi yang lebih sering dengan guru dan siswa untuk mendapatkan respons positif dari anggota sekolah.

Implementasi peraturan pemerintah di lingkungan sekolah oleh pekerja sosial sekolah

Sistem sekolah, khususnya sekolah internal, memiliki berbagai peran untuk mempersiapkan pendidik profesional dan elemen kepemimpinan di sekolah. Karena pendidik manusia potensial memegang peran strategis, mereka harus mengatasi masalah perundungan. Tentu saja mereka sangat penting dalam perlindungan anak yang tertanam dalam orientasi sekolah dan manajemen sekolah. Hal ini didukung oleh pernyataan dari seorang guru BK (JM) yang menyatakan bahwa:

“ Peraturan Sekolah merupakan peraturan yang telah disepakati dan berlaku bagi semua di sekolah serta harus ditaati oleh setiap guru dan siswa di Sekolah karena

peraturan merupakan pedoman bagi siswa dalam berbicara, bertindak, bertingkah laku dan melaksanakan aktivitas sehari-hari di Sekolah dalam menciptakan iklim dan budaya Sekolah yang dapat mencegah terjadinya perundungan. Posisi Pekerja Sosial di Sekolah memberikan dukungan penuh dalam merencanakan kebijakan peraturan-peraturan sekolah di lakukan satu kali dalam setahun tepatnya sebelum acara kenaikan kelas diadakan dengan melibatkan semua perangkat-perangkat yang terkait dengan Sekolah.

Pernyataan diatas dapat dipertegas posisi pekerja sosial sekolah memiliki peran utama dalam menjaga nilai sekolah, terutama di lingkungan sekolah yang mirip dengan Prinsip Pekerja Sosial. Ada sekolah yang dimodifikasi yang mengakui interaksi manusia dan nilai sosialnya yang dapat diterapkan di sekolah di Indonesia (Espelage, 2014) seperti:

1. Setiap murid dinilai sebagai individu, terlepas dari karakteristik unik mereka.
2. Mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan realisasi diri
3. Setiap siswa harus diizinkan untuk berbagi proses pembelajaran.
4. Menghormati individu dan potensi untuk mendukung aspirasi individu untuk mencapainya. 3. Perbedaan individu (seperti perbedaan dalam tingkat pembelajaran) harus diakui; Intervensi harus ditujukan untuk mendukung tujuan pendidikan siswa.
5. Hak setiap individu untuk berbeda satu sama lain, harus dihormati
6. Setiap anak, terlepas dari ras dan karakteristik sosial ekonomi, memiliki hak untuk perlakuan yang sama di sekolah.

Peran mediasi pekerja sosial sekolah dalam pencegahan perundungan

Pernyataan dari seorang guru BK (Dh) yang menyatakan bahwa: *perilaku perundungan di*

sekolah merupakan masalah kompleks, yang mana anak-anak tidak pernah ingin diganggu, terutama dari teman-teman sebaya. Perilaku perundungan juga diajarkan tidak secara langsung kepada anak-anak, terutama dari guru yang kesal dengan pengalaman masa lalu dan trauma yang dialami anak-anak. Pernyataan di atas dapat dipertegas bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi seorang anak mengalami perundungan. Faktor-faktor ini termasuk faktor biologis dan temperamen, keluarga, teman, dan lingkungan sekolah. Penelitian Halpern dkk. (2015) menunjukkan bahwa kombinasi individu, sosial, dan lingkungan dapat memiliki bahaya dan perlindungan yang saling berpengaruh dalam menentukan etiologi perilaku perundungan.

Perundungan adalah masalah di lingkungan sekolah yang harus dipahami oleh pekerja sosial sekolah. Mereka sering dipanggil untuk menanggapi, karena adanya dampak perundungan yang signifikan terhadap kesehatan mental siswa. Keterlibatan siswa dalam pengalaman perundungan, baik sebagai target, agresor, atau saksi, dapat meningkatkan keyakinan mereka, dan sikap yang memerlukan intervensi kehidupan sosial yang memengaruhi kompetensi sosial, perilaku, dan status pendidikan mereka. Siswa yang terlibat dalam perundungan cenderung memiliki tingkat ide bunuh diri yang lebih tinggi dan perilaku berisiko dan mungkin lebih rentan terhadap gangguan kejiwaan daripada anak-anak yang tidak terlibat dalam perundungan.

Penindasan adalah suatu bentuk perilaku kekerasan dalam hal imposisi psikologis atau fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang lain. Sementara itu, perundungan di sekolah adalah perlakuan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh siswa di sekolah. Pelaku perundungan

sekolah pada umumnya adalah teman sebaya, siswa yang lebih tua, atau bahkan seorang guru. Perundungan di sekolah memberikan banyak kerugian bagi siswa yang menjadi korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, tekanan psikologis, dan sebagainya. Karena itu, perundungan di sekolah adalah masalah mendasar yang harus segera diatasi.

Peran pekerja sosial untuk menangani masalah terkait pendidikan

Pernyataan dari seorang guru BK (Hk) yang menyatakan bahwa: *“Peran pekerja sosial dapat menangani persoalan seperti kedisiplinan mengingat pentingnya kedisiplinan baik guru maupun siswa di sekolah dengan mematuhi peraturan yang ada, pekerja sosial telah melakukan penjelasan dan sosialisasi dampak dari perundungan”*

Pernyataan di atas dipertegas bahwa perundungan memiliki dampak negatif pada perkembangan karakter anak-anak (Yeager dkk., 2015), pekerja sosial sekolah harus menangani korban dan pelaku. Kegagalan untuk mengatasi perundungan akan menghasilkan agresi lebih lanjut. Perundungan yang dialami oleh korban dapat menimbulkan perasaan tertekan dan menyebabkan efek negatif, seperti, korban menderita sakit fisik dan psikologis (Juvonen & Graham, 2014), penurunan harga diri (Tsaousis, 2016), rasa malu (Mazzone dkk., 2016), trauma, tidak mampu melawan (Evans dkk., 2014), merasa sendirian (Rönkä dkk., 2014), ketakutan, dan fobia sekolah (Kahn dkk., 2014). Penelitian lain yang mendukung hal ini, yakni Chadwick (2014) menambahkan bahwa perundungan juga berdampak pada keputusan lain seperti keluar dari sekolah, ketakutan sosial, dan bunuh diri.

Anak-anak dilindungi di lingkungan sekolah agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan sekolah. Ini telah disempurnakan

dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Peraturan tersebut telah menjamin perlindungan dan kebebasan dari diskriminasi, terutama di masa sekolah. Hal serupa dari pernyataan seorang guru BK (TJ) bahwa: *“dalam menangani persoalan perundungan pekerja sosial memberikan masukan dalam memperbaiki peraturan-peraturan di Sekolah yang sudah diterapkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang.*

Pernyataan diatas dapat dipertegas bahwa: pekerja sosial sekolah memiliki peran utama seperti

1. Penyuluh bagi pendidik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.
2. Konsultan nilai sosial untuk individu, kelompok, organisasi dan masyarakat.
3. Pemodelan pola dan praktik karakter utama melalui peran langsung dan tidak langsung untuk memberikan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan oleh siswa. Untuk layanan tidak langsung, pekerja sosial dapat melakukan pencarian atau pengembangan sumber baru yang dapat digunakan untuk menghubungi lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan siswa lain. Untuk layanan langsung ke individu dan kelompok dalam pendidikan, pekerja sosial dapat melakukan konseling, diagnosis dan pengobatan kasus.

Advokasi untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara siswa dan guru, atau siswa dengan kepala sekolah.

4. Konselor kesinambungan dan perubahan.

Karena pekerja sosial sekolah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa siswa hadir secara mental, fisik, dan emosional di lingkungan sekolah, peran mereka penting untuk meningkatkan pembelajaran nilai sosial melalui praktik dan pemodelan (Hepworth dkk., 2016).

KESIMPULAN

Pekerja sosial sekolah memberikan peran penting dalam sistem pendidikan, terutama dalam mengatasi masalah sosial, emosional, perilaku dan kesehatan mental di antara siswa dan anggota sekolah lainnya. Peran mereka telah diatur dalam undang-undang pemerintah tentang perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Sekolah seharusnya memberikan fasilitas untuk semua anak tanpa terkecuali terutama mengenai edukasi anti kekerasan dan perundungan. Hal ini lah yang dapat ditanamkan oleh setiap sekolah yang ada di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai visi dan misi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang humanis bagi seluruh siswa nya tanpa ada yang merasa terdiskriminasi.

Perhatian penuh sekolah dapat dititikberatkan pada peningkatan pelayanan sosial bagi siswa yaitu dengan menyediakan tenaga kerja atau pendidik yang terampil serta paham akan kebutuhan siswa agar dapat mengaktualisasikan diri mereka sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial nya di lingkungan sosial sekolah juga di lingkungan sosial masyarakat. Peran pekerja sosial di sekolah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian visi dan misi sekolah untuk memberikan pelayanan sosial terutama dalam mencegah perilaku-perilaku menyimpang siswa yang melakukan perundungan terhadap sesama teman nya.

Advokasi sosial dapat dikembangkan sekolah untuk membantu mengedukasi orang tua, guru, administrator sekolah, dewan pendidikan dan komunitas yang lebih besar tentang pentingnya pembelajaran nilai sosial. Dalam memenuhi tujuan dan standar pendidikan, pekerja sosial dapat memberikan pelatihan dan konseling tentang layanan advokasi untuk anggota sekolah.

SARAN

Kepada pihak sekolah dapat melakukan edukasi dan sosialisasi serta menjalankan fungsi sekolah dengan menerapkan peraturan-peraturan sekolah kepada siswa mengenai bahaya melakukan perundungan juga memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak yang dirasakan atau ditimbulkan bagi korban perundungan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan aturan yang disertai sanksi sebagai bentuk pencegahan terjadinya perundungan dikalangan siswa.

Kepada pekerja sosial sekolah dapat mengurangi penyebab perilaku perundungan melalui keberadaan pekerja sosial di lingkungan sekolah, yang mereka memiliki peran dalam pembelajaran nilai sosial. Pekerja sosial sekolah mempromosikan iklim sekolah yang positif dan memberikan layanan dukungan sosial kepada siswa untuk memaksimalkan sumber daya sekolah dalam interaksi sosial yang sehat.

Kepada Guru dan Siswa hendaknya memberikan tindakan langsung dalam memberikan peraturan-peraturan yang baik karena dengan sikap tauladan guru yang taat akan menjadikan perilaku siswa sesuai dengan harapan-harapan sekolah sehingga terhindari dari perilaku perundungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah hasil penelitian dengan topik perundungan telah tertuang dalam bentuk naskah jurnal, diharapkan akan memberikan makna tersendiri bagi pekerja sosial dalam memainkan peran kolaborasi dengan guru-guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada informan/responden guru-guru bimbingan dan konseling di berbagai sekolah negeri dan swasta di kota Bandung yang telah meluangkan waktunya

untuk diwawancarai. Tak lupa juga peneliti memberikan apresiasi kepada kepala sekolah yang memberikan izin kepada guru BK untuk mengikuti agenda proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, K. R., & Bussey, K. (2016). Cyberbystanding in context: a review of the literature on witnesses' responses to cyberbullying. *Children and Youth Services Review*, 65, 183–194.
- Akos, P., & Galassi, J. P. (2004). Middle and high school transitions as viewed by students, parents, and teachers. *Professional School Counseling*, 212-221.
- Berg-Weger, M. (2016). *Social work and social welfare: an invitation*. Routledge.
- Barlińska, J., Szuster, A., & Winiewski, M. (2013). Cyberbullying among adolescent bystanders: role of the communication medium, form of violence, and empathy. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 23(1), 37–51
- Chadwick, S. (2014). *Impacts of cyberbullying, building social and emotional resilience in schools*. Springer Science & Business Media.
- Clark, R. M. (2015). *Family life and school achievement: Why poor black children succeed or fail*. University of Chicago Press.
- Dembo, R., Wareham, J., Schmeidler, J., & Winters, K. C. (2016). Longitudinal effects of a second-order multi-problem factor of sexual risk, marijuana use, and delinquency on future arrest among truant youths. *Journal of Child & Adolescent Substance Abuse*, 25(6), 557-574.
- Espelage, D. L. (2014). Ecological theory: Preventing youth bullying, aggression, and victimization. *Theory Into Practice*, 53(4), 257-264.
- Espelage, D. L., & Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: What have we learned and where do we go from here?. *School psychology review*, 32(3), 365-384.
- Espelage, D. L., Hong, J. S., Rao, M. A., & Thornberg, R. (2015). Understanding ecological factors associated with bullying across the elementary to middle school transition in the United States. *Violence and victims*, 30(3), 470-487.
- Evans, C. B., Fraser, M. W., & Cotter, K. L. (2014). The effectiveness of school-based bullying prevention programs: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 19(5), 532-544.
- Farmer, T. W., Irvin, M. J., Motoca, L. M., Leung, M. C., Hutchins, B. C., Brooks, D. S., & Hall, C. M. (2015). Externalizing and internalizing behavior problems, peer affiliations, and bullying involvement across the transition to middle school. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 23(1), 3-16.
- Fekkes, M., van de Sande, M. C. E., Gravesteyn, J. C., Pannebakker, F. D., Buijs, G. J., Diekstra, R. F. W., & Kocken, P. L. (2016). Effects of the Dutch Skills for Life program on the health behavior, bullying, and suicidal ideation of secondary school students. *Health Education*, 116(1), 2-15.
- Flick, U. (2014). *An introduction to qualitative research*. Sage.
- Gould, N., & Taylor, I. (2017). *Reflective learning for social work: research,*

- theory and practice*. Routledge.
- High, A. C., & Young, R. (2018). Supportive communication from bystanders of cyberbullying: indirect effects and interactions between source and message characteristics. *Journal of Applied Communication Research*, 46(1), 28–51
- Halpern, J., Jutte, D., Colby, J., & Boyce, W. T. (2015). Social dominance, school bullying, and child health: what are our ethical obligations to the very young?. *Pediatrics*, 135(Supplement 2), S24-S30.
- Hepworth, D. H., Rooney, R. H., Rooney, G. D., & Strom-Gottfried, K. (2016). *Empowerment Series: Direct Social Work Practice: Theory and Skills*. Nelson Education.
- Hinduja, S. (2016). 24 Addressing Discrimination to Prevent Bullying. *Bullying Today: Bullet Points and Best Practices*, 24.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. Corwin Press.
- Juvonen, J., & Graham, S. (2014). Bullying in schools: The power of bullies and the plight of victims. *Annual review of psychology*, 65, 159-185.
- Kazerooni, F., Hardman Taylor, S., Bazarova, N. N., & Whitlock, J. (2018). Cyberbullying bystander intervention: the number of offenders and retweeting predict likelihood of helping a cyberbullying victim. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 23(3)
- Kahn, J. H., Nursten, J. P., & Carroll, H. C. (2014). Unwillingly to school: School phobia or school refusal: A psychosocial problem. Elsevier.
- Kaufman, J. (2013). An evaluation of a middle school bully prevention program. Saint Mary's College of California.
- Larkin, H., Felitti, V. J., & Anda, R. F. (2014). Social work and adverse childhood experiences research: Implications for practice and health policy. *Social work in public health*, 29(1), 1-16.
- Lee, J. A., & Hudson, R. E. (2017). Empowerment Approach to Social Work Treatment. *Social work treatment: Interlocking theoretical approaches*, 142.
- Litwiller, B. J., & Brausch, A. M. (2013). Cyber bullying and physical bullying in adolescent suicide: the role of violent behavior and substance use. *Journal of youth and adolescence*, 42(5), 675-684.
- Macháčková, H., & Pfetsch, J. (2016). Bystanders' responses to offline bullying and cyberbullying: the role of empathy and normative beliefs about aggression. [article]. *Scandinavian Journal of Psychology*, 57(2), 169–176
- Mazzone, A., Camodeca, M., & Salmivalli, C. (2016). Stability and Change of Outsider Behavior in School Bullying The Role of Shame and Guilt in a Longitudinal Perspective. *The Journal of Early Adolescence*, 0272431616659560.
- Nocentini, A., Menesini, E., & Salmivalli, C. (2013). Level and change of bullying behavior during high school: A multilevel growth curve analysis. *Journal of adolescence*, 36(3), 495-505.

- Paludi, M. A. (2015). Sexual Harassment of Teenage Girls: Implications for Reporting Gendered Violence as Adults. *Sexual Harassment in Education and Work Settings: Current Research and Best Practices for Prevention: Current Research and Best Practices for Prevention*, 187.
- Payne, M. (2015). *Modern social work theory*. Oxford University Press.
- Rönkä, A. R., Rautio, A., Koironen, M., Sunnari, V., & Taanila, A. (2014). Experience of loneliness among adolescent girls and boys: Northern Finland Birth Cohort 1986 study. *Journal of youth studies*, 17(2), 183-203.
- Shearer, A., Hunt, M., Chowdhury, M., & Nicol, L. (2016). Effects of a brief mindfulness meditation intervention on student stress and heart rate variability. *International Journal of Stress Management*, 23(2), 232.
- Smith, P. K. (2014). *Understanding school bullying: Its nature and prevention strategies*. Sage.
- Spring, J. (2016). *Deculturalization and the struggle for equality: A brief history of the education of dominated cultures in the United States*. Routledge.
- Tsaousis, I. (2016). The relationship of self-esteem to bullying perpetration and peer victimization among schoolchildren and adolescents: A meta-analytic review. *Aggression and Violent Behavior*, 31, 186-199.
- Veenstra, R., Lindenberg, S., Huitsing, G., Sainio, M., & Salmivalli, C. (2014). The role of teachers in bullying: The relation between antibullying attitudes, efficacy, and efforts to reduce bullying. *Journal of Educational Psychology*, 106(4), 1135.
- Werner, D. (2015). Are school social workers prepared for a major school crisis? Indicators of individual and school environment preparedness. *Children & Schools*, 37(1), 28-35.
- Yeager, D. S., Fong, C. J., Lee, H. Y., & Espelage, D. L. (2015). Declines in efficacy of anti-bullying programs among older adolescents: Theory and a three-level meta-analysis. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 37, 36-51.